

2017

# LAPORAN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLPHD) KABUPATEN PATI

TAHUN 2017



# KATA PENGANTAR



LAPORAN IKPLHD KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami sampaikan kehadirat ALLAH SWT karena atas izin dan rahmat Nya, kami dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pati Tahun 2017 yang merupakan laporan tentang gambaran kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

IKPLHD disusun guna menjalankan amanat : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab VIII tentang Sistem Informasi pasal 65 ayat 1 – 3. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan system informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

Informasi ini juga untuk memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan public sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 7 mengamanatkan bahwa badan public wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik, membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi yang disediakan secara berkala, diumumkan serta merta dan tersedia setiap saat.





Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah juga telah melimpahkan kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup.

IKPLHD tidak hanya menyajikan gambaran status atau kondisi lingkungan hidup tetapi juga menyajikan informasi tentang perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya, yang merupakan factor tekanan terhadap lingkungan. Dimana dengan keterbatasan sumber daya alam dan teknologi, tekanan tersebut harus tetap dikendalikan sehingga tidak menimbulkan bencana ekologi. Upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program untuk pengendalian dan penanganan dampak lingkungan yang terjadi, menjadi respon penting untuk menjagak keberlanjutan lingkungan. Dukungan dan peran serta masyarakat termasuk para pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam merespon hal tersebut juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

IKPLHD disusun berdasarkan isu prioritas guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara administratif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah dengan menggunakan pendekatan PSR (Pressure State and Response).

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017 ini tidak terlepas dari kekurangan. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan sangat membantu dalam mengoptimalkan fungsi laporan IKPLHD sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan rencana dan





program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pati.

Akhirnya, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 ini. Mudah-mudahan kerja sama dan koordinasi yang telah terbina dengan baik ini dapat meningkat lagi, selain itu kami berharap kedepan kebutuhan akan data

Pendukung guna menyusun Tabel Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pati dapat diakses dengan mudah serta senantiasa dilaksanakan up date data.

  
BUPATI  
PATI  
H. HARYANTO, SH, MM, M.Si



# LEMBAR PERNYATAAN



LAPORAN IKPLHD KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017



LEMBAR PERNYATAAN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2017

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pati disusun sebagai system informasi lingkungan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, dalam perumusan isu prioritas daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup perlu melibatkan para pihak terkait, bersama ini saya sebagai Bupati Pati menyatakan bahwa Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 ini telah dirumuskan dan disusun dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pati, April 2018



- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR LAMPIRAN



LAPORAN IKPLHD KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Lembar Pernyataan .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KEADAAN UMUM DAERAH .....	3
1.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	3
A. Luas dan Batas Wilayah .....	3
B. Topografi .....	6
C. Geologi .....	8
D. Hidrologi .....	8
E. Klimatologi .....	13
1.2.2. Potensi Unggulan Daerah .....	23
A. Potensi Pertanian .....	23
B. Potensi Peternakan .....	24
C. Potensi Perikanan .....	25
D. Potensi Industri.....	25
E. Potensi Pertambangan.....	27
F. Potensi Pariwisata .....	27
1.3. PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	28





1.4.	MAKSUD DAN TUJUAN.....	33
1.5.	RUANG LINGKUP PENULISAN.....	34
BAB II. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP .....		37
BAB III. ANALISIS PRESSURE STATE DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH .....		48
3.1.	TATA GUNA LAHAN .....	48
3.2.	KUALITAS AIR SUNGAI .....	54
3.2.1.	Air Permukaan Tanah .....	55
3.2.2.	Air Bawah Tanah .....	56
3.2.3.	Potensi Air Tanah .....	57
3.2.4.	Evaluasi Hasil.....	61
3.3.	KUALITAS UDARA .....	74
3.4.	RESIKO BENCANA .....	83
3.5.	PERKOTAAN.....	91
3.5.1.	Persampahan .....	92
3.5.2.	Limbah B3 .....	93
BAB IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....		96
4.1.	INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH .....	97
4.2.	INOVASI DI BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK RUMAH TANGGA .....	118
4.3.	INOVASI DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI	119
4.4.	INOVASI DI BIDANG MANGROVE .....	121
4.5.	ANGGARAN .....	122
4.6.	KELEMBAGAAN .....	122
BAB V. PENUTUP .....		125
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan .....	5
Tabel 1.2. Rata-rata Ketinggian Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pati .....	7
Tabel 1.3. Daerah Banjir di Kabupaten Pati .....	9
Tabel 1.4. Rata-rata Curah Hujan Per hari (mm) Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016 .....	13
Tabel 1.5. Peristiwa Bencana Alam dan Wabah Penyakit di Kabupaten Pati 2012-2016 .....	19
Tabel 1.6. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati .....	20
Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati 2012-2016 .....	21
Tabel 1.8. Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pati Tahun 2012-2016 .....	22
Tabel 1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016 .....	22
Tabel 1.10. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pati Tahun 2012-2016.....	23
Tabel 2.1. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan dan TPT Kabupaten Pati Tahun 2017-2018 .....	45
Tabel 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Wanarakuti Aspek Lingkungan Hidup .....	46
Tabel 3.1. Luas Jenis Lahan di Kabupaten Pati Berdasarkan Kecamatan .....	48
Tabel 3.2. Titik Pengambilan Sampling Sungai Sani .....	63
Tabel 3.3. Titik Pengambilan Sampling Daerah yang Memberikan Kontribusi Pencemaran .....	64
Tabel 3.4. Hasil Analisis Sungai Sani pada Musim Penghujan .....	64
Tabel 3.5. Hasil Analisis Sungai Sani pada Musim Kemarau . .....	66
Tabel 3.6. Daftar Hasil Analisis Cemar Berasal dari Sumber-sumber Kontributor .....	67





---

Tabel 3.7.	Kualitas Udara Ambien Kabupaten Pati Tahun 2017 dengan Metode Infinger dengan Durasi Pengukuran kurang lebih 2 jam .....	76
Tabel 3.8.	Kualitas Udara Ambien Kabupaten Pati Tahun 2017 dengan Metode Passive Sampler .....	77
Tabel 3.9.	Tabel Penjualan Kendaraan Bermotor .....	81
Tabel 3.10.	Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana .....	91





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Pati .....	4
Gambar 1.2. Peta Hidrologi Kabupaten Pati .....	9
Gambar 1.3. Kawasan Pesisir Kabupaten Pati .....	12
Gambar 1.4. Penanaman Mangrove di Pantai Kertomulyo .....	13
Gambar 1.5. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati .....	15
Gambar 1.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati .....	17
Gambar 2.1 Skema Visi Kabupaten Pati .....	42
Gambar 3.1. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati .....	50
Gambar 3.2. Peta Citra Satelit Pantai Kabupaten Pati Tahun 2001 dan 2014	52
Gambar 3.3. Peta Potensi Air Tanah di Wilayah Kabupaten Pati .....	59
Gambar 3.4. Titik Pengambilan Sampling Air Sungai Jiglong Berdasarkan Tata Guna Lahan .....	68
Gambar 3.5. Titik Pengambilan Sampling Air Sungai Lengkowo Berdasarkan Tata Guna Lahan .....	69
Gambar 3.6. Titik Pengambilan Sampling Air Sungai Sani Berdasarkan Tata Guna Lahan .....	70
Gambar 3.7. Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2017 .....	79
Gambar 3.8. Peta Rawan Banjir .....	84
Gambar 3.9. Peta Rawan Longsor .....	85
Gambar 3.10. Peta Resiko Rawan Kekeringan .....	86
Gambar 3.11. Peta Rawan Angin Puting Beliung .....	87
Gambar 4.1. Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Sukoharjo .....	99
Gambar 4.2. Pipa Saluran Gas Metan dari TPA Sukoharjo Menuju Rumah Warga .....	99





Gambar 4.3.	Pemanfaatan Gas Metan Menjadi Bahan Bakar Alternatif (Biogas) untuk Keperluan Memasak .....	99
Gambar 4.4.	Pemanfaatan Gas Metan Menjadi Energi Listrik di TPA Sukoharjo	101
Gambar 4.5.	Lokasi Pengolahan sampah Plastik melalui alat Destilator menjadi Bahan Bakar Alternatif Pengganti BBM di TPA Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati .....	102
Gambar 4.6.	Alat Destilator di TPA Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati .....	103
Gambar 4.7.	Bahan Bakar Hasil Proses Destilasi .....	103
Gambar 4.8.	Pintu Masuk Menuju TPA Sukoharjo Kab. Pati .....	105
Gambar 4.9.	Jalan di Area TPA Sukoharjo Kab. Pati .....	105
Gambar 4.10.	Fasilitas Pendukung di TPA Sukoharjo Kab. Pati .....	106
Gambar 4.11.	Kunjungan dari Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang ke TPA Sukoharjo Kab. Pati .....	106
Gambar 4.12.	Kunjungan dari Peerta Diklat Pengelolaan TPA Balai Teknis Air Minum dan Sanitasi untuk Indonesia Wilayah Timur ke TPA Sukoharjo Kab. Pati .....	107
Gambar 4.13.	Kunjungan dari Siswa/i Sekolah ke TPA Sukoharjo Kab. Pati .....	107
Gambar 4.14.	Pelatihan Kader Lingkungan Kabupaten Pati di TPA Sukoharjo Kab. Pati .....	107
Gambar 4.15.	Rumah Kompos di Pemukiman dan di Pasar .....	108
Gambar 4.16.	Pengolahan Sampah Organik Melalui Biomethagreen .....	109
Gambar 4.17.	Biogas dan Pupuk Organik dari Hasil Pengolahan Sampah Ortganik Melalui Biomethagreen .....	109
Gambar 4.18.	Pemasaran Handycraft dari Sampah Anorganik di Pasar Pragola (Pasar Unggulan) di Kab. Pati .....	110
Gambar 4.19.	Pemasaran Handycraft dari Sampah Anorganik Melalui Keikutsertaan dalam Kegiatan Pameran .....	111
Gambar 4.20.	Workshop Daur Ulang Sampah menjadi Kerajinan .....	112
Gambar 4.21.	Bimbingan Teknis Pembuatan Kompos .....	112
Gambar 4.22.	Kerja Bakti Massal Membersihkan Pantai Banyutoro Kec. Dukuhseti Kab. Pati .....	113





Gambar 4.23.	Aksi Pungut sampah dan Pengambilan Paku di Pohon oleh Saka Kalpataru Kab. Pati .....	113
Gambar 4.24.	Gerakan Semar (Sebelas Maret) Jumput Sampah .....	114
Gambar 4.25.	Pelaksanaan Lomba Inovasi Pengelolaan Lingkungan .....	115
Gambar 4.26.	Gerakan Penghijauan Lingkungan di RW 8 Desa Kutoharjo Kec. Pati Kab. Pati .....	116
Gambar 4.27.	Aktivitas di Bank Sampah Asri Raharjo .....	116
Gambar 4.28.	a.Pemanfaatan Energi Surya untuk Penerangan Taman, b. IPAL Domestik Rumah Tangga .....	116
Gambar 4.29.	Pembinaan Kader Lingkungan Kabupaten Pati .....	117
Gambar 4.30.	Kader Lingkungan Memberikan Pelatihan Daur Ulang Sampah ke Masyarakat .....	118
Gambar 4.31.	Pemanfaatan IPAL Domestik untuk Menyiram Tanaman .....	119
Gambar 4.32.	a.IPAL Industri Tapioka di Ds. Sekarjalak Kec. Margoyoso, b. IPAL Biogas Tahu Tempe.....	120
Gambar 4.33.	Pengaduan secara Online .....	121



# BAB I PENDAHULUAN



LAPORAN IKPLHD KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dasar dari kebijakan Pembangunan Nasional yang telah diterapkan selama ini adalah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pola pembangunan tersebut mengandung makna mengusahakan hasil yang sebaik-baiknya dari sumber alam yang tersedia seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dengan cara memelihara keberlanjutan kualitas dan potensi sumber daya alam itu sepanjang masa. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh rakyat serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu ancaman degradasi lingkungan harus diwaspadai, tidak hanya oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi setiap kita sebagai pemangku kepentingan -(stake holder)- juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan untuk diwariskan kepada anak cucu kita.

Pembangunan segala aspek di era globalisasi dan otonomi daerah berkembang sangat pesat dan cepat, namun hal itu tidak saja memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk, akan tetapi juga memberikan dampak negative berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspek pelestarian lingkungan hidup. Keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan hidup perlu diakomodasikan ke dalam suatu kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, sehingga akan menciptakan pembangunan yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah daerah pun tidak dapat terlepas dari orientasi kebijakan pembangunan berkelanjutan tersebut, karena pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan pembangunan yang





mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah daerah pun tidak dapat terlepas dari orientasi kebijakan pembangunan berkelanjutan tersebut, karena pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat berlangsung secara optimal, apabila tidak ada campur tangan pemerintah daerah melalui kebijakan yang jelas dan terarah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang, lintas pelaku, dan lintas generasi. Dimensi lintas ruang adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir, permasalahannya mungkin tidak terbatas pada satu daerah administrasi tertentu. Oleh karena itu pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir memerlukan suatu jaringan informasi lingkungan hidup antar wilayah administrasi, sedikitnya di satu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimensi kedua, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku. Salah satu contoh adalah pencemaran sungai dimana sumber pencemar tersebut dapat berasal dari berbagai pihak misalnya sektor industri, permukiman, dan pertanian. Dimensi ketiga, permasalahan lingkungan hidup selalu menyangkut lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dikelola untuk generasi sekarang dan masa datang.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pati saat ini dan pada masa mendatang, terdapat empat permasalahan lingkungan hidup yang menjadi fokus perhatian akibat akselerasi pembangunan yang mengakibatkan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup itu terabaikan. Keempat permasalahan lingkungan hidup itu ialah: 1) kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau lemahnya praktek 3R, yaitu: *reused, reduced and recycled*); dan 2) Masih rendahnya pengelolaan air limbah domestik rumah tangga; 3) Masih rendahnya pengelolaan limbah industri, 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan mangrove, Keempat kondisi di atas saat ini dipandang perlu untuk segera mendapatkan perhatian secara serius dari Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian keempat permasalahan di atas juga merupakan permasalahan lingkungan hidup





yang dijadikan program atau kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Pati dalam rangka melaksanakan perbaikan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup guna mencapai kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengantisipasi kondisi lingkungan hidup hingga masa mendatang.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Pati berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mewujudkan akuntabilitas publik. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan/kondisi lingkungan hidup, penyebab dan dampak permasalahannya, serta respon pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup tersebut.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Pati Tahun 2017 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyediaan informasi kondisi lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan, rencana dan program guna mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan secara berkelanjutan.

## 1.2. KEADAAN UMUM DAERAH

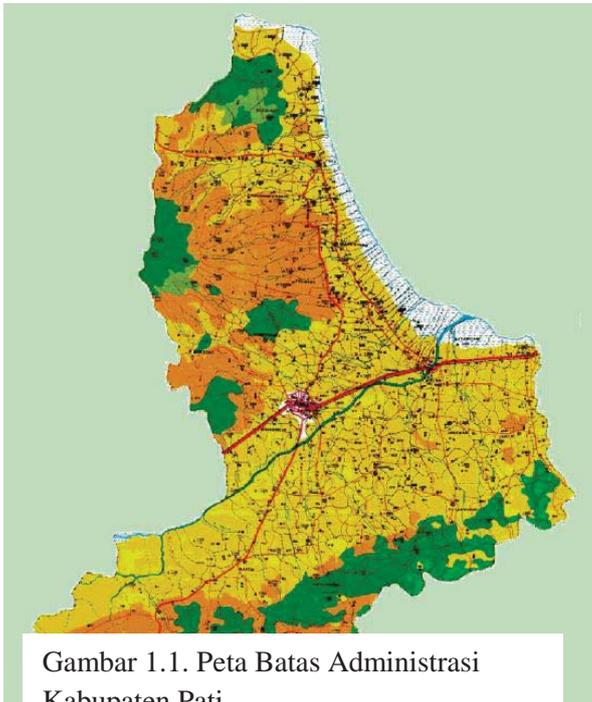
### 1.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di wilayah pesisir pantai utara Jawa pada sisi bagian timur wilayah provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kabupaten Pati, terletak diantara  $110^{\circ} 50'$  -  $111^{\circ} 15'$  bujur timur dan  $6^{\circ} 25'$  -  $7^{\circ} 00'$  lintang selatan. Adapun secara administratif, batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : dibatasi wilayah Kab. Jepara dan Laut Jawa.
- Sebelah barat : dibatasi wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara.
- Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kab. Grobogan dan Kab. Blora.





Gambar 1.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Pati

- Sebelah timur : dibatasi wilayah Kab. Rembang dan Laut Jawa.

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah, 66.086 Ha lahan bukan sawah dan 24.950 ha lahan bukan pertanian.

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Pati sejak tahun 2006 terdiri atas 21 Kecamatan, 5 Kelurahan, 401 Desa, 1.484 Rukun Warga (RW) dan 7.586 Rukun Tetangga (RT). Pusat

pemerintahan Kabupaten Pati berada di Kecamatan Pati.

Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per kecamatan di Kabupaten Pati.





**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan**

NO.	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT Number of RT	Jumlah RW
1	Sukolilo	12	478	86
2	Kayen	17	433	70
3	Tambakromo	18	341	63
4	Winong	30	474	81
5	Pucakwangi	20	333	68
6	Jaken	21	311	81
7	Batangan	18	273	53
8	Juwana	29	370	88
9	Jakenan	23	356	59
10	Pati	29	569	99
11	Gabus	24	401	76
12	Margorejo	18	318	65
13	Gembong	11	267	82
14	Tlogowungu	15	322	70
15	Wedarijaksa	18	318	58
16	Trangkil	16	374	60
17	Margoyoso	22	336	80
18	Gunungwungkal	15	241	47
19	Cluwak	13	310	77
20	Tayu	21	395	75
21	Dukuhseti	12	343	46
	Jumlah/Total	406	7.585	1.484

Sumber: Bagian Pemerintahan Daerah Pati

Source: Governmental Division of Pati Regency Office

Catatan/Note: \*5 kelurahan dan 24 desa/5 kelurahan and 24 villages





## B. Topografi

Topografi Kabupaten Pati sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di wilayah timur dan utara Kabupaten Pati yang merupakan pesisir pantai utara, membentang mulai dari Kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Tayu sampai Dukuhseti. Wilayah dengan kontur datar terletak sebagian besar di Kecamatan Pati, Margorejo, Batangan, Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Tayu, Dukuhseti, Winong, Jaken, Jakenan, Kayen, Gabus, Pucakwangi Tambakromo

Kondisi topografis dataran tinggi pada ketinggian 250 – 500 meter dari permukaan laut (dpl) terletak di bagian barat laut dan utara wilayah Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Cluwak. Wilayah yang mempunyai ketinggian 380 dpl yaitu Kecamatan Gembong. Daerah yang sebagian wilayahnya masuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yaitu Sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo yang berada di bagian Selatan Kabupaten Pati pada ketinggian sekitar  $\pm$  200 meter dari permukaan laut (dpl) yang merupakan pegunungan kendeng utara.

Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Pati dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Bagian utara, barat dan tengah merupakan daerah yang relatif subur; 2) Bagian selatan merupakan pegunungan kapur yang memiliki potensi tambang cukup besar, tentunya untuk wilayah yang tidak masuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, selain itu memiliki potensi wisata alam gua; 3) Bagian timur merupakan daerah pesisir yang mempunyai potensi perikanan dan produk garam yang relative menjanjikan. Bagian Barat Daya dan Utara memiliki potensi hortikultura, perkebunan, hutan, tambang dan pariwisata agrowisata. Kondisi topografi Kabupaten Pati terbagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain:





Ketinggian Lahan  
Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Pati dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 1.2.**

Rata-rata Ketinggian Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pati

NO.	KECAMATAN	Tinggi tempat (m dpl)		
		Tertinggi	Terendah	Rata-rata
1	Sukolilo	262	5	85.69
2	Kayen	245	5	67.71
3	Tambakromo	375	13	79.22
4	Winong	320	6	33.73
5	Pucakwangi	223	15	51.15
6	Jaken	53	15	30.05
7	Batangan	18	2	9.00
8	Juwana	9	2	4.86
9	Jakenan	26	4	12.83
10	Pati	21	4	11.83
11	Gabus	8	2	3.92
12	Margorejo	123	5	34.39
13	Gembong	298	107	219.36
14	Tlogowungu	624	38	172.87
15	Wedarijaksa	18	2	10.50
16	Trangkil	90	2	19.06
17	Margoyoso	113	2	21.59
18	Gunungwungkal	600	49	214.67
19	Cluwak	467	6	205.00
20	Tayu	61	1	12.90
21	Dukuhseti	72	2	12.67
	Jumlah/Total			

Sumber: BPS Kabupaten Pati

Source: BPS-Statistics Pati Regancy





### C. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Pati terdiri dari Kondisi Tanah Bagian utara terdiri dari tanah Red Yellow, Latosol, Aluvial, Hidromer dan Regosol. Sedangkan bagian selatan terdiri tanah Aluvial, Hidromer, dan Gromosol. Rincian menurut kecamatan sebagai berikut :

- Batangan, Sukolilo, Gabus dan Jakenan merupakan tanah Aluvial.
- Cluwak, Gunungwungkal dan Gembong merupakan tanah Latosol.
- Juwana dan Margoyoso merupakan tanah Aluvial dan Red Yellow mediteran.
- Pati dan Margorejo merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol, Aluvial dan Hidromer.
- Kayen dan Tambakromo merupakan tanah Aluvial dan Hidromer.
- Pucakwangi dan Winong merupakan tanah Gromosol dan Hidromer
- Wedarijaksa merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol dan Regosol.
- Tayu merupakan tanah Aluvial, Red Yellow dan regosol.
- Tlogowungu merupakan tanah Latosol dan Red Yellow mediteran.

### D. Hidrologi

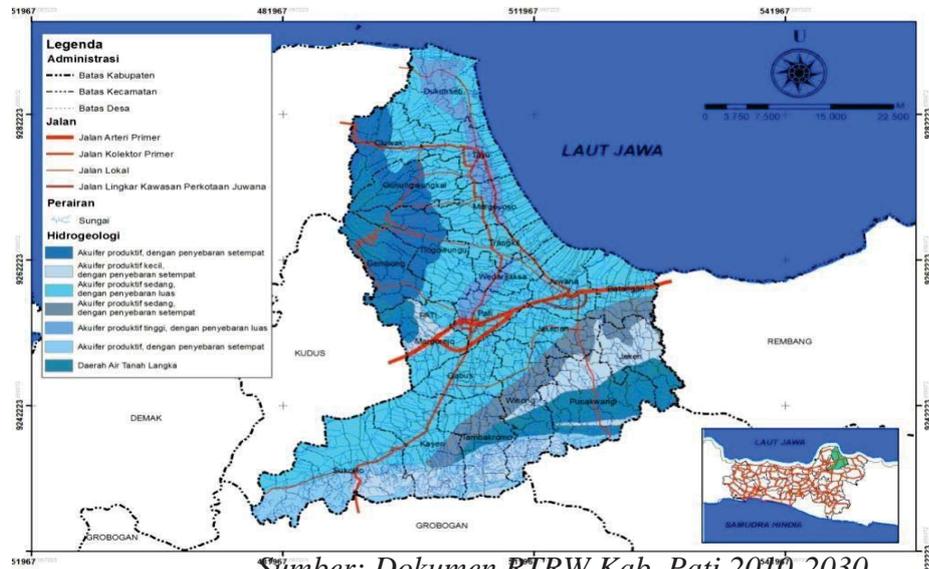
Ketersediaan sumber air di Kabupaten Pati cukup besar didukung keberadaan sungai yang tersebar di seluruh wilayah. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Aquifer produktif tersebar di sebagian besar Kecamatan Gembong, Tlogowungu, dan Gunungwungkal serta sebagian kecil Kecamatan Cluwak. Adapun aquifer produktif tinggi yang sudah dimanfaatkan tersebar di sebagian Kecamatan Pati, Wedarijaksa, Margoyoso, dan Dukuhseti.

Wilayah Kabupaten Pati diidentifikasi terdapat 33 sungai yang merupakan DAS Juwana dan 62 sungai yang merupakan non DAS Juwana, yang sebagian besar merupakan sungai-sungai kecil. Sungai-sungai di Kabupaten Pati pada musim kemarau kebanyakan dari sungai-sungai yang ada





mengalami kekeringan. Sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar 1.2

### Peta Hidrogeologi Kabupaten Pati

Meluapnya sungai-sungai yang ada, sering menyebabkan banjir di daerah hilir, yang disebabkan adanya pendangkalan dan penyempitan sungai pada bagian hilir. Pendangkalan dan penyempitan ini terjadi akibat adanya sedimentasi oleh material bawaan air sungai pada musim penghujan, menyebabkan sungai tidak dapat menampung debit air sungai yang datang dari hulu ke hilir. Beberapa daerah banjir yang terdapat di Kabupaten Pati berdasarkan kompilasi data dari tiap ranting adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.

### Daerah Banjir di Kabupaten Pati

No.	Nama Sungai	Lokasi Banjir	Keterangan
1.	Kersulo	Dukuh Cangkring Desa Payang Kec. Pati	
2.	Simo	Dukuh Purworejo Desa Gadingrejo Kec. Pati	Akibat Pendangkalan
3.	Sani	Kecamatan Pati	Akibat Pendangkalan
4.	Gadu	Kecamatan Tayu (Desa Margomulyo, Desa Jepat Lor, Desa Jepat Kidul, Desa Tunggulsari) dan	Akibat Jebol atau rusak nya tanggul pada Sungai Gandul pada 2





No.	Nama Sungai	Lokasi Banjir	Keterangan
		Kecamatan Margoyoso (Desa Margotuhu Kidul, Desa Semerak)	titik.
5.	Kuro	Daerah hilir sungai	Menggenangi tambak dan pertanian
6.	Sat	Desa Cebolek desa Waturejo Kec. Tayu	Penyatuan Sungai Sagen, Sumber dan Galarum
7.	Suwatu	Desa Bulumanis Kec. Margoyoso	Tanggul bobol dan pendangkalan
8.	Pangkalan	Daerah hilir sungai pada daerah tambak dan sawah	
9.	Pangarep	Daerah hilir sungai	
10.	Sentul	Desa Mantingan tengah, Sembatur Agung, Tondokerto, Glonggong, Bungasrejo Kec. Jakenan	Perlu normalisasi sungai dan tanggul sungai
11.	Kedunglo	Kec. Winong	Tidak ada tanggul, penyempitan sungai
12.	Triguno	Kec. Winong	
13.	Gono	Kec. Winong	Meluap sampai ke jalan
14.	Tumpang	Desa Pulorejo dan Bumuharjo Kec. Winong	
15.	Maling	Kecamatan Jakenan	Berbatasan langsung dengan jalan raya yang menuju Desa Semabatur Agung
16.	Randugunting	Desa Tamansari, Majang dan Sumber Agung	Sering banjir bandang, sedimentasi tinggi
17.	Widodaren	Kec. Jaken	Sering meluap
18.	Bapoh	Dukuh Triwil dan Masong, Desa Margorejo, Ngepungrejo, Sinoman Kec. Wedarijaksa	Menggenangi persawahan dan permukiman
19.	Gungwedi	Desa Wedari, Pagerharjo, Desa Gempol persawahan; dan desa Ngurenrejo, Margomulyo, Nguren siti perkampungan, Kec. Wedarijaksa	Pendangkalan
20.	Mangin	Desa Kayen, Trimulyo Kec.	Banjir bandang terjadi





No.	Nama Sungai	Lokasi Banjir	Keterangan
		Kayen	pendangkalan
21.	Slungkep	Desa Kayen, Kec. Kayen	Akibat pendangkalan dan penyempitan
22.	Karang	Pasuruhan, Srikaton	Akibat pendangkalan dan penyempitan
23.	Cilik	Pasuruhan	Akibat pendangkalan dan penyempitan

Sumber : Data Ranting Kabupaten Pati, 2016

Berdasarkan data tersebut diatas, maka permasalahan banjir di daerah Pati sebelah selatan patut diwaspadai, karena banjir hampir selalu terjadi tiap tahunnya, terutama pada saat curah hujan tinggi yang terjadi di Kecamatan Juwana, Gabus, Jaken, Pati, Sukolilo, Trangkil, Margoyoso, Tayu dan Dukuhseti. Permasalahan banjir ini ternyata masih belum mampu dikendalikan sebagaimana mestinya, walaupun telah diupayakan pembenahan terhadap sarana dan prasarana untuk pengendalian banjir. Hal tersebut, terbukti pada awal tahun 2016 tepatnya pada bulan Januari masih terjadi bencana banjir bandang cukup parah di 2 (dua) Kecamatan, Yaitu : Kecamatan Tayu dan Kecamatan Margoyoso, dengan total area terendam pada Kecamatan Tayu seluas  $\pm$  904,150 ha sedangkan pada Kecamatan Margoyoso seluas  $\pm$  181.028 ha dikarenakan rusaknya atau longsohnya tanggul pada Sungai Gadu di dua titik. Sedangkan bencana Banjir tahun 2017 terjadi di Kecamatan Sukolilo, Gabus, Juwana, Jakenan dan Pati, yang disayangkan BPBD Kabupaten Pati tidak mendata wilayah terendam seperti yang diminta pada Penyusunan Buku Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi hanya mendata jumlah pengungsi dan jumlah kerugian. Sedangkan data yang kami peroleh dari Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Data tergenang banjir di Kecamatan Dukuhseti adalah sebagai berikut :

- Desa Kembang seluas 65 ha umur 7 – 30 hst (hari setelah tanam);
- Desa Dukuhseti seluas 10 ha umur 7 – 30 hst (hari setelah tanam);
- Desa Grogolan seluas 10 ha umur 7 – 30 hst (hari setelah tanam);
- Desa Tegalombo seluas 7 ha umur 7 – 30 hst (hari setelah tanam);

Jumlah 92 ha varietas chrang, Ir 64, Inpari 32, Membramo.





## 2. Data Puso yang diakibatkan oleh Bencana Banjir Kecamatan Dukuhseti :

- Desa Kembang 51 ha
- Desa Grogolan 5,5 ha
- Desa Tegalombo 2 ha
- Jumlah 58,5 ha umur 15 - 40 hst (hari setelah tanam);

Permasalahan banjir merupakan fenomena alam dan termasuk bencana geologi yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan lingkungan hidup dan aktifitas manusia.

Sedangkan permasalahan utama yang terjadi di wilayah pesisir yaitu abrasi , akibat rusaknya hutan bakau dan adanya alih fungsi lahan pengaman pantai menjadi areal pertambakan. Upaya pemulihan garis pengaman pantai, baik melalui upaya teknis maupun vegetatif telah dilakukan di beberapa tempat. Gambar dibawah ini merupakan salah satu contoh upaya pengamanan garis pantai.



**Gambar 1.3.**

### **Kawasan Pesisir Kabupaten Pati**

Pada kawasan pesisir telah terjadi degradasi lingkungan yang sangat parah, hutan bakau rusak berat. Kawasan sempadan pantai sudah beralih fungsi menjadi tambak, di beberapa tempat terjadi abrasi dan hampir sepanjang pantai terjadi akresi yang disebabkan karena tingginya erosi pada daerah hulu, sehingga diperlukan pengelolaan lingkungan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Pengelolaan lingkungan hidup untuk daerah hulu dilakukan dengan cara penanaman pohon untuk penghijauan di daerah tangkapan air sehingga akan mengurangi erosi di daerah hulu. Selain itu diadakan penanaman mangrove secara





masal yang dilaksanakan oleh komunitas peduli lingkungan kerja bareng dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.



Gambar 1.4

Penanaman Mangrove di Pantai Kertomulyo

#### E. Klimatologi

Temperatur tertinggi di Kabupaten Pati adalah 34°C dan terendah 23°C.

Berdasarkan data iklim diketahui rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Pati berkisar 283,92 mm. Rata-rata curah hujan (mm) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4**  
**Rata-Rata Curah Hujan Perhari (mm) Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

No.	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	20,20	20,80	42,05	21,85	76,06
2	Februari	16,25	24,44	17,33	24,46	175,66
3	Maret	18,43	23,39	16,78	23,38	106,42
4	April	23,50	26,04	14,60	26,08	119,93
5	Mei	17,63	28,13	16,00	28,10	67,23
6	Juni	14,00	19,55	16,86	19,50	75,13
7	Juli	0,00	15,88	21,00	15,86	49,97
8	Agustus	0,00	21,24	5,38	74,33	22,97
9	September	0,67	52,52	11,00	4,04	55,23
10	Oktober	13,67	13,67	8,00	13,60	158,97
11	Nopember	14,78	17,62	22,14	17,64	121,27
12	Desember	15,43	33,41	25,59	33,39	141,45

Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka, 2017

Kabupaten Pati memiliki iklim tropis dengan rata – rata curah hujan di Kabupaten Pati di tahun 2016 sebanyak 2.142 mm dengan 116 hari hujan,





untuk keadaan hujan cukup, sedangkan untuk temperatur terendah 23°C dan tertinggi 39°C.

#### A. Penggunaan Lahan

Lahan di Kabupaten Pati digunakan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung.

##### 1) Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya di Kabupaten Pati dapat dikategorikan menjadi: peruntukan permukiman, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Peruntukan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi tertinggi terdapat di Kecamatan Pati dan Juwana. Peruntukan pertanian untuk persawahan irigasi tersebar di daerah dataran rendah, sedangkan untuk persawahan tadah hujan terdapat di sebagian Kecamatan Tambakromo dan Cluwak, serta tegalan terdapat di sebagian Kecamatan Tlogowungu, Gembong, Margorejo, Trangkil, Margoyoso, dan Gunungwungkal. Peruntukan perkebunan tersebar di sepanjang kawasan Pegunungan Kendeng dan sebagian Kecamatan Dukuhseti. Peruntukan perikanan budidaya tersebar di sepanjang wilayah pantai.

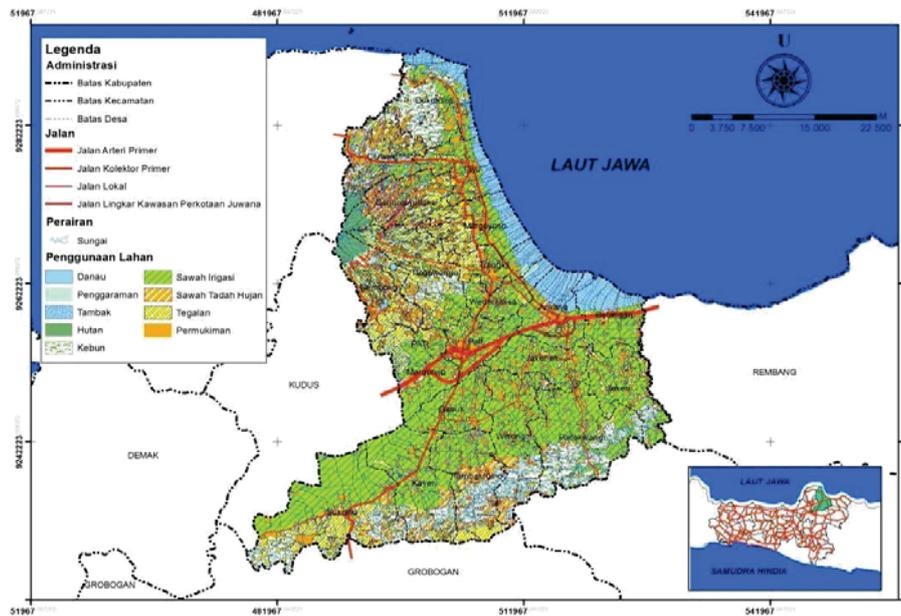
##### 2) Kawasan Lindung

Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung di lereng Gunung Muria yang terdapat di sebagian Kecamatan Tlogowungu, Cluwak, Gembong, dan Gunungwungkal. Kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan resapan air yang melindungi kawasan di bawahnya. Kawasan lindung lainnya adalah Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang terdapat di sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai di sepanjang kawasan pantai; sempadan sungai di sepanjang sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Pati; sempadan waduk di sekitar Waduk Gunungrowo dan Seloromo di Kecamatan Gembong; sempadan mata air di sekitar mata air di seluruh wilayah Kabupaten Pati.





Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Pati ditampilkan pada peta berikut:



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

**Gambar 1.5**  
**Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati**

### 3) Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi wilayah di Kabupaten Pati sebagaimana disebut dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 yang dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung.

#### a) Pengembangan kawasan budidaya

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dibagi menjadi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

- Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan pertanian ditujukan untuk pertanian lahan basah (sawah) dan hortikultura.

- Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan meliputi kecamatan : Margorejo, Gembong, Margoyoso, Gunungwungkal, Cluwak, dan Dukuhseti.





- Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar, dan pengolahan ikan.

- Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:

- Potensi bahan tambang besi di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu.
- Potensi bahan tambang fosfat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
- Potensi bahan tambang kalsit di Kecamatan Kayen
- Potensi bahan tambang batu gamping untuk semen di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
- Potensi bahan tambang tras di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak.
- Potensi bahan tambang sirtu di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Winong.

b) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

- Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi di Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati.
- Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan dan Kecamatan Juwana.
- Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo.





- Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

c) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata buatan.

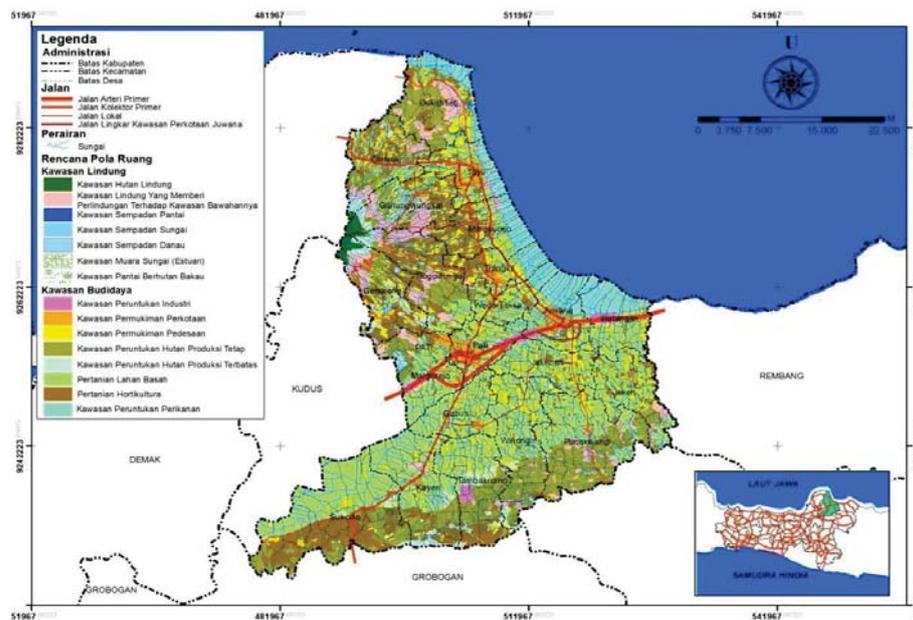
d) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di masing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

e) Pengembangan Kawasan Lindung

Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk pengelolaan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pati ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030

Gambar 1.6

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati





## B. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data IRBI 2013, indeks risiko bencana Kabupaten Pati sebesar 174 dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Pati 2014, terdapat beberapa potensi bencana di Kabupaten Pati yaitu, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Adapun persebaran potensi bencana berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan banjir di Kabupaten Pati,  
Potensi bencana banjir di Kabupaten Pati secara umum tinggi karena tersebar hampir di tiap kecamatan di Kabupaten Pati terutama yang berada di sepanjang pesisir pantai diantaranya Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, dan Batangan, serta kecamatan yang dilalui Sungai Juwana diantaranya, Kecamatan Jakenan, Juwana, Pati, Winong, Tambakromo, Margorejo, Gabus, Kayen, dan Sukolilo.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor,  
Ancaman bencana longsor di Kabupaten Pati secara umum terdapat di dua area yaitu area Utara yang berada di lereng Gunung Muria di antaranya Kecamatan Gunungwungkal, Cluwak, Tlogowungu dan Gembong, serta area Selatan yang terdapat pada perbatasan Selatan Kabupaten Pati dengan kabupaten lain diantaranya Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Jaken, dan Pucakwangi.
- 3) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Pati  
Wilayah dengan ancaman bencana kekeringan meliputi beberapa wilayah di sisi Selatan yaitu, di sebagian Kecamatan Kayen, Jaken, dan Gabus.
- 4) Kawasan rawan angin puting beliung di Kabupaten Pati meliputi:  
Wilayah dengan status risiko tinggi tersebar di wilayah Selatan terutama di Kecamatan Tambakromo Kecamatan Kayen, Gabus, Jakenan, dan Sukolilo.





5) Kawasan rawan gempa di Kabupaten Pati

Beberapa wilayah di Kabupaten Pati dilewati oleh patahan, sehingga berpotensi mengalami bencana gempa bumi, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Wedarijaksa, Juwana, Pati, Gabus, Margorejo, Kayen, dan Sukolilo.

6) Kawasan rawan bencana gelombang pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang terdapat di sepanjang pesisir pantai, meliputi Kecamatan Dukuhseti Kecamatan Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Juwana, dan Batangan.

Gambaran peristiwa bencana alam dan wabah penyakit serta perkiraan kerugian yang ditimbulkan di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2012-2016 ditampilkan berikut.

**Tabel 1.5**  
**Peristiwa Bencana Alam dan Wabah Penyakit di Kabupaten Pati Tahun 2012 -2016**

No	Keterangan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Lokasi Bencana di Kabupaten Pati	NA	217	333	63	85
2.	Perkiraan kerugian akibat bencana (juta rupiah)	NA	19.157,49	1.643.413,66	756.354,45	890.467
3.	Jumlah wabah/Endemi pada manusia (kasus)					
	b. Demam Berdarah	303	569	280	923	1.226
	c. Hepatitis	NA	NA	71	92	158
	d. Tuberkolosis	633	544	495	372	104

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Pati, 2017.





Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Nilai kerugian akibat bencana pada tahun 2014 terlihat paling besar dibanding tahun-tahun lainnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 terjadi bencana banjir besar di Kabupaten Pati yang melanda 182 desa/kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan mengakibatkan 48.846 rumah terendam dan 45.697 jiwa penduduk mengungsi. Bencana ini diikuti bencana tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan pada talud jalan maupun tanggul sungai.

Besarnya nilai kerugian akibat bencana maupun banyaknya penduduk terdampak bencana menunjukkan bahwa indeks kerentanan dalam menghadapi bencana tinggi, sedangkan indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah. Oleh karena itu untuk menurunkan indeks risiko bencana diperlukan strategi peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

### C. Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi BPS Kabupaten Pati, jumlah penduduk pada tengah tahun 2016 sebanyak 1.239.989 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 825 jiwa/km<sup>2</sup>. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup juga semakin tinggi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.6**  
**Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km <sup>2</sup> )
2012	1.207.399	803
2013	1.218.016	810
2014	1.225.594	815
2015	1.232.889	820
2016*	1.239.989	825

*Sumber: BPS Kabupaten Pati 2013-2017*

Perbandingan kepadatan penduduk kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan Kabupaten Pati memiliki kepadatan penduduk relatif rendah.





Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Pati (825 jiwa/km<sup>2</sup>) menempati urutan ke-8 kepadatan penduduk terendah dari 29 kabupaten lainnya, setelah Kabupaten Blora (475), Wonogiri (521), Rembang (611), Grobogan (684), Purworejo (686), Wonosobo (789), dan Cilacap (792). Sex Ratio penduduk Kabupaten Pati Tahun 2016 sebesar 93,97, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kabupaten Pati, akan terdapat pula sebanyak 94 pria di dalamnya sehingga bisa dikatakan cukup seimbang. Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Jenis Kelamin	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Laki-Laki	586.531	590.181	593.810	597.314	600,723
Perempuan	620.529	627.835	631.784	635.598	639,266
Jumlah Total	1.207.060	1.218.016	1.225.594	1.232.912	1.239.989
Laju Pertumbuhan (%)	0,71	0,91	0,62	0,60	0,57

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2013-2017

Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2012-2016, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati cenderung menurun.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian di suatu daerah sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu sumber daya daerah yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penduduk. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap dan tingkat kesejahteraan penduduk. Berikut adalah gambaran penduduk usia kerja di Kabupaten Pati periode 2012-2016.





**Tabel 1.8**  
**Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Tahun	Angkatan Kerja (orang)		Bukan Angkatan Kerja (orang)	Penduduk Usia Kerja/ Tenaga Kerja (orang)
	Bekerja	Mencari Kerja (Pengangguran)		
2012	562.487	78.177	262.503	903.167
2013	594.736	46.863	259.583	901.182
2014	607.933	41.390	293.015	942.338
2015	617.299	28.613	306.283	952.195
2016*	627.652	26.979	307.294	961.925

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013–2016 dan Disnaker Kabupaten Pati 2017.

Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI.

Berdasarkan gender, sekitar 75% bukan angkatan kerja adalah perempuan, dimana persentase tersebut yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga adalah sekitar 75%, menunjukkan produktivitas perempuan rendah. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, sedangkan TPT yang tinggi menunjukkan terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

**Tabel 1.9**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016**

Tahun	Penduduk Usia Kerja / Tenaga Kerja (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2012	903.167	640.664	70,94
2013	901.182	641.599	71,20
2014	942.338	649.323	68,91





2015	952.195	645.912	67,83
2016*	961.925	654.631	68,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2016 dan Disnaker Kab. Pati 2017.

(Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penurunan angkatan kerja. Penurunan drastis tingkat pengangguran terjadi di tahun 2013. Hal ini dikarenakan survey di tahun 2012 dilakukan berdekatan dengan hari raya, sehingga penduduk usia kerja yang merantau ke luar wilayah Kabupaten Pati berada di rumah dan meningkatkan persentase pengangguran.

**Tabel 1.10**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Mencari Kerja (pengangguran) (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2012	78.177	640.664	12,20
2013	46.863	641.599	7,30
2014	41.390	649.323	6,37
2015	28.613	645.912	4,43
2016*	26.979	654.631	4,12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2016 dan Disnaker Kab. Pati 2017.

(Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI).

## 1.2.2. Potensi Unggulan Daerah

### A. Potensi Pertanian

Kondisi daerah Pati dengan karakteristik yang beragam menjadikan beragam pula potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pati. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Pati beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar. Sedangkan untuk tanaman yang





dipanen berkali kali meliputi : kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, semangka dan blewah. Tanaman yang dipanen hanya sekali yaitu : Bawang merah bawang putih, bawang daun, kentang, kol, kupis, sawi, wortel, lobak dan kacang merah. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao, durian dan kelapa. Terdapat komoditas khas Kabupaten Pati yaitu: kelapa kopyor, Jeruk Pamelon.

Berkaitan dengan program nasional pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, maka difokuskan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Untuk produksi dan rata-rata produksi padi dan palawija tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Komoditas Padi sawah luas panen 111.094 ha, Produksi 652.675, rata-rata produksi 58,75. Sedangkan komunitas padi ladang adalah sebagai berikut : luas panen 3.308, produksi 13,669 rata-rata produksi 41,23.

Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, peningkatan jalan usaha tani yang diharapkan dapat membantu distribusi hasil pertanian serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini didukung oleh beberapa sumber dana anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Daerah.

## **B. Potensi Peternakan**

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Pati meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya di seluruh wilayah Kabupaten Pati adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan Babi. Data BPS pada Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun 2017 menunjukkan jumlah sapi potong sebanyak 94.619, sapi perah 148 ekor dan kerbau sebanyak 1.436 ekor, Kambing 179.552 ekor, domba 23.792, babi 588.

Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Pati saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan di areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar dengan





system close house yang tidak begitu mengganggu lingkungan sekitar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dialokasikan di areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan atau di lahan dengan peruntukan hortikultura. Ternak kecil didominasi ayam buras dan ayam kampung. Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun 2017 menyebutkan jumlah ayam buras sebanyak 7.402.065 ekor, ayam kampung sebanyak 969.644 ekor.

### C. Potensi Perikanan

Potensi bidang perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut di Kabupaten Pati sangat potensial dan prospektif, hal ini sesuai dengan semboyan Kabupaten Pati yaitu Pati Bumi Mina Tani. Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah pesisir seluas 37.943 Ha yang meliputi 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Tayu dan Dukuhseti. Sedangkan jumlah desa pesisir sebanyak 136 desa. Panjang pantai relative panjang yaitu sepanjang 60 km, luas tambak pesisir 10.193.116 ha, luas tambak garam 2.838.111 ha, (dari 4 kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa, dan Trangkil) produksi garam tahun 2017 sebanyak 115.638,86 ton. Produksi perikanan tangkap sebanyak 27.654.878 kg bila dirupiahkan Rp.239.573.812.700,00, produksi perikanan budidaya tambak sebanyak 31.755.940 kg bila dirupiahkan Rp. 503.875.470.000,00, produksi perikanan budidaya kolam sebanyak 10.257.690 kg bila dirupiahkan Rp.165.222.865.000,00, produksi perairan umum (sungai) sebanyak 108.249 kg bila dirupiahkan Rp.203.338.000,00, produksi perairan umum (waduk) sebanyak 19.010 kg bila dirupiahkan Rp.987.245.000,00. Selain produksi sector perikanan di Kabupaten Pati juga dikembangkan produk olahan ikan berupa pemindangan, ikan asin, pemanggangan, trasi, krupuk ikan, pengolahan segar, dan diverifikasi pengolahan lain. (Data selang pandang perikanan 2017)





#### **D. Potensi Industri**

Bidang industri di Kabupaten Pati berkembang seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh khususnya pada daerah Kecamatan Juwana yang dilalui jalur Pantura dan berdekatan dengan pelabuhan Juwana. Industri di wilayah Juwana sangat beragam sebagian besar merupakan produksi industri kuningan, industri olahan ikan. Di Kecamatan Juwana juga terdapat industri batik Bakaran. Selain itu di Kecamatan Margoyo adalah merupakan sentra industri tapioka yang memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Menurut Data BPS Pati Dalam Angka Tahun 2017 membagi jenis industri menjadi industri besar dan sedang yang dirinci menurut jenis industri menjadi sebagai berikut : industri makanan minuman jumlah 181 buah, industri tembakau 4 buah, industri tekstil 14 buah , industri kertas dan percetakan 4 buah, industri kimia dan barang dari kimia 5 buah, industri karet dan barang dari karet 4 buah, industri galian bukan logam 10 buah, industri kuningan 24 buah, industri lainnya 9 buah. Pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Pati Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, dimana bahan bakunya banyak tersedia di daerah Pati Selatan.

#### **E. Potensi Pertambangan**

Kabupaten Pati memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Pati Selatan. Lokasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara meliputi :

- (1) Potensi bahan tambang besi di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 0,35 Ha (nol koma tiga puluh lima hektar).
- (2) Potensi bahan tambang fosfat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 13,2 Ha (tiga belas koma dua hektar).
- (3) Potensi bahan tambang kalsit di Kecamatan





Kayen dengan luas kurang lebih 0,03 Ha. (nol koma nol tiga hektar) (4) Potensi bahan tambang batu gamping untuk semen di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 9.101 Ha (sembilan ribu seratus satu hektar).

(5) Potensi bahan tambang tras di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 81,5 Ha (delapan puluh satu koma lima hektar). (6) Potensi bahan tambang sirtu di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 334,3 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma tiga hektar). (7) Potensi bahan tambang tanah liat terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 18.600 Ha (delapan belas ribu enam ratus hektar). Potensi bahan tambang minyak dan gas bumi adalah pertambangan minyak bumi yang terdapat di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pati.

Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup.

#### **F. Potensi Pariwisata**

Kabupaten Pati memiliki potensi pariwisata yang apabila dikembangkan memiliki prospek yang bagus. Jenis Pariwisata di Kabupaten Pati dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Wisata Alam meliputi :
  - a. kawasan agrowisata berada di sepanjang lereng Gunung Muria bagian timur meliputi Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Cluwak;
  - b. kawasan pariwisata Air berada di Kecamatan Kayen;
  - c. kawasan pariwisata Gua Pancur berada di Kecamatan Kayen;





- d. kawasan pariwisata Air Terjun Nggrenjengan Sewu berada di Kecamatan Gunungwungkal; dan
  - e. kawasan pariwisata Air Terjun Tadah Hujan, Gua Wareh, Sendang Widodari berada di Kecamatan Sukolilo;
2. Wisata Budaya meliputi :
- a. kawasan pariwisata Genuk Kemiri di Kecamatan Pati;
  - b. kawasan pariwisata Pintu Gerbang Majapahit berada di Kecamatan Margorejo; dan
  - c. kawasan pariwisata Religi berada Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tayu.
3. Wisata Buatan meliputi :
- a. kawasan pariwisata Waduk Gunung Rowo di Kecamatan Gembong;
  - b. kawasan pariwisata Sendang Tirta Marta Sani berada di Kecamatan Tlogowungu; dan kawasan pariwisata pendidikan lingkungan di TPA Margorejo.

Selain itu Kabupaten Pati juga kaya akan keindahan alam dan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri.

Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

### 1.3. PENETAPAN ISU PRIORITAS

Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan





hidup, karena memperhatikan kualitas lingkungan hidup menjadi hal yang sangat krusial dilakukan saat ini mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal dan berkontribusi terhadap skala global. Penyebabnya adalah pembangunan dan industrialisasi yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Menjadikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda global yang fokus menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, merupakan agenda yang harus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Guna lebih memfokuskan pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan, maka perlu dilakukan indentifikasi isu-isu prioritas lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Pati. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian depan (lihat 1.1), isu prioritas yang konkrit sesuai dengan kondisi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pati bisa ditegaskan lagi menjadi ada empat isu, yaitu:

**1. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau lemahnya praktek 3R, yaitu: reused, reduced and recycled)**

Bertambah jumlah penduduk, perubahan perilaku dan gaya hidup disertai pertumbuhan ekonomi, bertambahnya daerah permukiman mengakibatkan bertambahnya volume jumlah sampah setiap harinya lengkap dengan jenis sampah yang dihasilkan. Sarana dan prasarana persampahan yang terbatas akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks sehingga banyak masyarakat dalam mengelola sampah kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sampah yang akhirnya membuang sampah di jalan, saluran selokan, sungai dan lahan-lahan terbuka. Sumber-sumber sampah biasanya diperoleh dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan sampah perikanan. Dimana masing-masing sumber penghasil sampah mempunyai kewajiban untuk mengelola sampah yang dihasilkan sejak dari sumber timbulan sampah. Oleh sebab itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata namun juga membutuhkan partisipasi





seluruh elemen lapisan masyarakat dan industri swasta. Laju produksi sampah sering kali tidak sebanding dengan proses penanganannya sehingga perlu dipikirkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk menanggulangi masalah persampahan serta bagaimana masyarakat difasilitasi dan dimotivasi dalam melaksanakan program 3R (reused, reduced and recycled).

## 2. **Masih rendahnya pengelolaan limbah domestik rumah tangga**

Hampir sama dengan isu yang pertama, rendahnya pengelolaan limbah domestik rumah tangga yang dihasilkan oleh sumber-sumber sampah banyak yang tidak dikelola dengan benar. Sumber- sumber pencemaran air dan tanah di bumi berasal dari kegiatan manusia . Dan sumber pencemaran terbesar berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Kedua limbah tersebut, jika diolah dengan baik, maka dapat mengurangi pencemaran pada air maupun tanah. Pengolahan limbah domestik sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan limbah yang baik. Pengolahan limbah domestik, adalah pengolahan limbah, sehingga air yang dibuang bukan lagi air yang tercemar zat perusak, melainkan air yang lebih bersih. Pengolahan limbah domestik masih tergolong rendah, karena masih banyak rumah tangga yang membuang limbah domestiknya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga akan mencemari lingkungan sekitar yang berakhir dengan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah domestik rumah tangga.

## 3. **Masih rendahnya pengelolaan limbah industri**

Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari suatu industri. Jenis dan karakteristik limbah industri sangat beragam sesuai dengan jenis industri itu sendiri. Limbah industri membutuhkan pengolahan bila ternyata mengandung senyawa pencemaran yang berakibat menciptakan kerusakan terhadap lingkungan atau paling tidak berpotensi menciptakan pencemaran. Untuk itu, diperlukan teknologi-teknologi pengolahan limbah yang baik. Kondisi di Kabupaten Pati relatif masih banyak industri yang belum mengelola limbahnya, kalau pun mengelola masih belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) saat ini baru 23 (dua puluh tiga)





pelaku usaha. Hal ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kalau limbah industri tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat dibagi menjadi empat bagian:

- a. Limbah cair biasanya dikenal sebagai entitas pencemar air. Komponen pencemaran air pada umumnya terdiri atas bahan buangan padat, bahan buangan organik, dan bahan buangan anorganik.
  - b. Limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang sesuai dengan sifat benda padat merupakan sampingan hasil proses produksi. Pada beberapa industri tertentu, limbah ini sering menjadi masalah baru sebab untuk proses pembuangannya membutuhkan satu pabrik pula.
  - c. Limbah gas dan partikel. Limbah gas dan partikel adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Pabrik mengeluarkan gas, asap, partikel, debu melalui udara, dibantu angin memberikan jangkauan pencemaran yang cukup luas. Gas, asap, dan lain-lain berakumulasi/bercampur dengan udara basah mengakibatkan partikel tambah berat dan malam hari turun bersama embun.
  - d. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat, konsentrasinya, dan jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan.
4. **Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan mangrove**

Kabupaten Pati yang memiliki garis pantai sepanjang 60 km, seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar di sektor perikanan berikut kegiatan budidaya yang dapat dilakukan di wilayah pesisir.





Demikian halnya dengan mangrove sudah seharusnya dipelihara dengan baik, karena mangrove merupakan tanaman yang sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan di wilayah pesisir

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Hutan mangrove di Kabupaten Pati mulai terancam dengan banyaknya lahan mangrove yang ditebang dan dijadikan lahan area pertambakan. Permasalahan lingkungan yang timbul karena pengrusakan mangrove selama tahun 2017 berjumlah .... kasus.

Penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan mangrove yaitu :

- a. Terjadinya abrasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia, penyebab faktor alam karena adanya arus gelombang yang terjadi akibat pasang surut air laut, sehingga lama-kelamaan mengikis tepian pantai, dan pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat, sehingga membuat permukaan air diseluruh dunia meningkat dan kemudian merendam daerah yang permukaannya rendah. Sedangkan abrasi yang disebabkan oleh faktor manusia, yaitu pengambilan batu karang dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan, dan penebangan pohon-pohon pada hutan mangrove atau hutan pantai. Hutan mangrove penting terhadap lingkungan dikarenakan hutan mangrove memiliki peranan atau fungsi yang penting baik fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi dan fungsi wisata, apabila hutan mangrove rusak atau bahkan hilang, banyak kerugian yang harus ditanggung manusia ataupun makhluk hidup lainnya serta lingkungan, seperti moluska, kepiting, ikan, udang, dan biota lainnya dan kerusakan pantai, dan lain-lainnya





#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

##### **MAKSUD :**

Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dimaksudkan untuk mendokumentasikan perubahan/kecenderungan kondisi lingkungan hidup, permasalahan, solusi pemecahan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Pati dengan kekuatan yang dimiliki serta menyediakan informasi yang dapat memberikan gambaran tingkat keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pati Tahun 2017.

##### **TUJUAN :**

Tujuan penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Pati adalah:

1. Menyediakan basis data untuk meningkatkan mutu informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari sistem pelaporan publik dan sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
2. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja dan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dan menengah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menyediakan sumber informasi sebagai dasar peningkatan kualitas pengambilan kebijakan/keputusan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dengan daya dukung dan daya tampungnya;
4. Menyediakan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) daerah serta sebagai landasan publik untuk ikut berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.





## 1.5. RUANG LINGKUP PENULISAN

Ruang lingkup penulisan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini, terdiri atas:

### I. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai profil dan keadaan umum Kabupaten Pati secara garis besar. Gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas juga dicantumkan. Bab ini juga menyebutkan maksud dan tujuan dari penulisan IKPLHD serta ruang lingkup penulisan laporan ini.

### II. Bab II Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Pada bab ini disebutkan gambaran mengenai tiga isu prioritas Kabupaten Pati yaitu Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau lemahnya praktek 3R, yaitu: reused, reduced and recycled), Masih rendahnya pengelolaan limbah domestik rumah tangga, Masih rendahnya pengelolaan limbah industri dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan mangrove. Muatan yang dituangkan pada bab isu prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.

### III. Bab III Analisa *Pressure, State, dan Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

Bab ini memuat analisis *Pressure, State, dan Response* untuk masing-masing isu lingkungan hidup di Kabupaten Pati, yang meliputi:

#### a. Tata Guna Lahan

Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan yang juga mencakup perubahan lahan seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah,





luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan lain sebagainya.

b. Kualitas Air

Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan air laut di Kabupaten Pati dengan parameter yang telah ditentukan.

c. Kualitas Udara

Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Pencemaran Udara (IPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, dan bahan tercemar yang terjadi di Kabupaten Pati.

d. Resiko Bencana

Data yang dimasukan berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuh, banjir, dan longsor. Selain itu mencantumkan juga sumber daya alam yang berpotensi terjadi bencana non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan bencana sosial.

e. Perkotaan

Perkembangan daerah perkotaan di Kabupaten Pati merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan yang kecenderungannya semakin sulit di kontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan. Kemunduran lingkungan perkotaan indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah. Selain itu dapat dilihat juga di aspek sosial ekonomi yang meliputi dampak dari manusia yang membuat kehidupan tidak nyaman.





#### **IV. Bab IV Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah. Selain itu pada bab ini juga mencantumkan inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Pati.

#### **V. Bab V Penutup.**

Bab ini memuat intisari dari bab II sampai dengan bab IV dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah.





## BAB II ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP



LAPORAN IKPLHD KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017





## BAB II

### ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pati akan mempermudah konsentrasi dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pati, dengan memperhatikan kondisi alam, kecenderungan lingkungan yang sering terjadi, tipologi masyarakat serta ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber dana. Hal lain yang turut menentukan penanganan isu prioritas lingkungan hidup yaitu kewenangan daerah. Seiring dengan sistem Desentralisasi yang mengarah kepada penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi perlu dilakukan penataan, peningkatan kemampuan dan kinerja daerah. Penataan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan lainnya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Upaya penataan daerah ini juga ditujukan kepada kemampuan meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta dapat memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan capaian yang positif antara lain Penghargaan Adipura untuk kota kecil, sampai dengan tahun 2017 ini merupakan penghargaan Adipura yang ke -11, penghargaan Adipura Kencana tahun 2014, penghargaan Adipura Buana tahun 2016, penghargaan Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Mandiri dari tahun 2008 – 2016, penghargaan yang diraih oleh Pasar Puri yaitu plakat pasar terbaik pada tahun 2013 , Penghargaan Wahana Tata Nugraha yang diberikan untuk Kabupaten yang berhasil menata transportasi dan lalu lintas dan memiliki kinerja baik dalam pengelolaan sistem transportasi kota juga dalam hal manajemen lalu lintas parkir dan pengelolaan terminal yang diperoleh dari tahun 2012 -2016, penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja sebagai 10 besar





penyelenggaraan pemerintahan terbaik tahun 2017, Juara 1 lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) tingkat Provinsi Jawa Tengah. Juara 1 lomba 3R (Reduce Reuse Recycle) tingkat provinsi yang diwakili oleh siswa SD N Ngarus 02, Penghargaan sebagai kabupaten dengan ketahanan pangan no 3 nasional, TPA terbaik untuk kota kecil.,

Namun demikian serentetan penghargaan di atas belum bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Pati telah berhasil dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah yang relative kompleks. Guna memenuhi kebutuhan warga Kabupaten Pati dengan wilayah yang cukup luas dengan kekhasan masing-masing wilayah diperlukan kerja keras dan cerdas untuk memperoleh tatanan kehidupan, masyarakat yang sejahtera dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup.

Masalah Pembangunan Kabupaten Pati dapat diidentifikasi dalam beberapa bidang. Penentuan permasalahan pembangunan sebagai bahan proses identifikasi isu strategis dimulai dari: (i) identifikasi prioritas sasaran pembangunan di RPJPD Kabupaten Pati; (ii) Evaluasi RPJMD 2012-2016; (iii) sinergitas RTRW; (iv) pengelompokan permasalahan menurut urusan pemerintahan; dan (v) analisis lingkungan strategis regional, nasional, dan internasional. Dari proses identifikasi tersebut kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya, dilakukan pembobotan melalui konsultasi publik, sehingga dihasilkan daftar isu strategis daerah. Sebagaimana hasil identifikasi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022, urusan lingkungan hidup masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Isu startegis lingkungan hidup di Kabupaten Pati meliputi :

- 1) Pemantauan status mutu air di bawah 50%. Hal ini menyebabkan indeks kualitas air masih rendah (46,67). Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan limbah domestik dan industri sebagai kontributor pencemar air.
- 2) Persentase penanganan sampah masih rendah (12,20%). Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan masyarakat untuk mengurangi volume sampah. Oleh karena itu perlu upaya untuk menangani sampah mulai dari sumbernya.





- 3) Rasio ruang terbuka hijau masih di bawah standar (20%). Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk menambah ketersediaan ruang terbuka hijau di masyarakat.

Selain memperhatikan isu strategis yang berkaitan dengan bidang lingkungan yang ada di Kabupaten Pati, juga memperhatikan tantangan isu dari kewenangan daerah Kabupaten Pati sebagai berikut

- 1) Mandat RPJPD Kabupaten Pati yaitu: (i) Kualitas SDM yang berkualitas dan berbudaya; (ii) pertumbuhan ekonomi; (iii) lingkungan hidup yang berkelanjutan; (iv) tata pemerintahan yang baik; (v) prasarana dan sarana yang kondusif; (vi) daya tarik dan daya saing daerah.
- 2) Mandat dari RTRW kabupaten Pati yaitu: (i) melayani PKL; (ii) sebagai salah satu kawasan lindung geologi.
- 3) Mandat Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pati, yaitu: (i) isu kesejahteraan masyarakat; (ii) Isu pelayanan publik.
- 4) Tantangan isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas, yaitu: (i) Isu kemiskinan; (ii) Isu penurunan produktivitas tanaman pangan; (iii) Isu penambangan tanpa izin; (iv) Isu rawan bencana alam dan iklim; (v) Isu penurunan kualitas dan kuantitas air; (vi) Isu pengelolaan limbah domestik belum optimal; (vii) Isu pengelolaan limbah industri belum optimal; (viii) Isu pengelolaan persampahan belum optimal; (ix) Isu kurang sadarnya masyarakat dalam pengelolaan hutan; (x) Isu menurunnya tutupan lahan hijau.

Setelah melakukan analisis SWOT isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa payung besar isu strategis Kabupaten Pati meliputi:

- 1) Isu sarana prasarana wilayah dan kerja sama antar daerah;
- 2) Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana;
- 3) Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- 4) Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah;





- 5) Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Dari hasil indentifikasi permasalahan tersebut selanjutnya ditetapkan isu strategis yang salah satunya adalah isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana. Lingkungan hidup yang sehat menjadi isu strategis menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berikut ini adalah isu-isu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup berkelanjutan.

Kondisi topografi dan geologi, sebagian besar wilayah Pati merupakan daerah rawan bencana sehingga bencana hampir terjadi setiap tahun. Pola hidup masyarakat yang tidak peduli terhadap pengurangan risiko bencana yang ditandai dengan besarnya kerugian akibat bencana menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah. Penurunan kualitas sumberdaya air diakibatkan oleh pencemaran dan aktivitas penduduk yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Diantaranya buangan limbah industri dan domestik yang belum terolah dengan baik. Selain itu perilaku masyarakat yang masih BABS terutama di badan air, turut berkontribusi meningkatkan cemaran air. Penurunan kuantitas sumberdaya air disebabkan karena berkurangnya kawasan tangkapan air. Hal ini terkait alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Terjadinya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun juga akan berakibat pada peningkatan emisi karbon yang akan meningkatkan kerawanan bencana iklim yang berdampak pada anomali cuaca. Secara ringkas isu keberlanjutan lingkungan hidup terkait dengan dampak perubahan iklim yang berisiko pada kejadian bencana alam. Fokus isu lingkungan mencakup: (i) Isu kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran; (ii) Isu peningkatan lingkungan permukiman dan sanitasi sehat. Isu Lingkungan hidup direspon dengan misi ke delapan yaitu "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan".





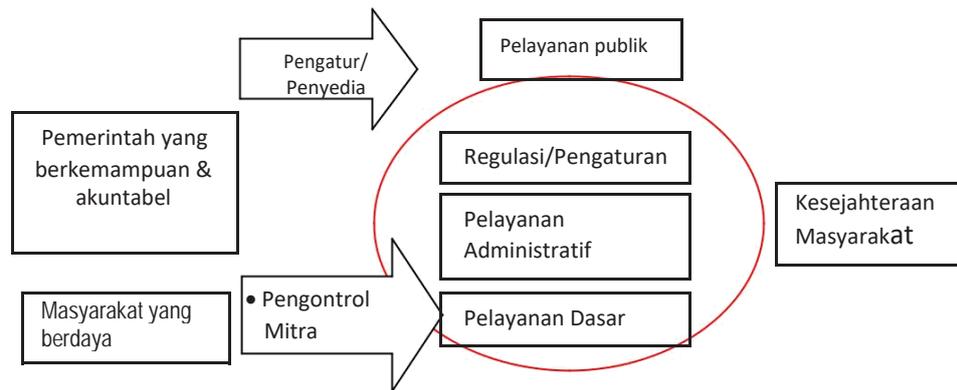
kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Pati. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi: "Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

Hubungan visi dan misi kabupaten Pati 2017-2022 digambarkan melalui gambar II.1. bahwa Visi Kabupaten Pati adalah mencapai dua keadaan ideal yaitu: (i) meningkatnya kesejahteraan rakyat dan (ii) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pencapaian kedua keadaan ideal tersebut memerlukan landasan kokoh yang harus dibangun selama kurun 2017-2022.

Landasan dasar sebagai komponen utamanya adalah: (i) pemerintah yang berkemampuan dan akuntabel, serta (ii) masyarakat yang berdaya. Pemerintah memainkan peran sebagai regulator, distributor, dan alokator sumberdaya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Sementara, warga memainkan peran sebagai produsen, mitra, dan juga pengawas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut memerlukan serangkaian strategi dan arah kebijakan untuk menjalankan ke-8 misi secara sinergis.





**Gambar 2.1**  
**Skema Visi Kabupaten Pati**

Perumusan strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan hasil analisis KLHS supaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun Analisis KLHS untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pati tahun 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penurunan daya dukung air terhadap akses air bersih;
  - a. Pengurangan jasa ekosistem ketersediaan pangan, air bersih, dan keanekaragaman hayati;
  - b. Dampak perubahan iklim mengancam peningkatan erosi, longsor dan sedimentasi serta menurunnya fungsi pengendali air sehingga pada musim hujan terjadi banjir dan musim kemarau terjadi kekeringan. Hal tersebut memunculkan adanya wilayah rawan bencana alam dan iklim.
  - c. Intensifikasi untuk mengejar produktivitas dengan bahan kimia secara tidak langsung mengancam kesehatan manusia dari konsumsi produk pangan pertanian;
  - d. Penanggulangan kelompok miskin rentan terhadap isu pembangunan berkelanjutan, dengan beberapa penyebabnya adalah:  
Pemanfaatan hasil ekstraksi alam tanpa kontrol untuk penyediaan pangan dan energi berisiko menurunkan keragaman hayati;  
Persentase masyarakat miskin terbesar merupakan petani. Hal tersebut diantaranya karena penerapan sistem budidaya pertanian yang kurang efektif serta adanya perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan gagal panen.





- e. Diperlukan penambahan strategi untuk: (i) Peningkatan pengelolaan sampah, limbah industri, dan limbah domestik; (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas air dengan mempertahankan tutupan lahan hijau; (iii) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Dengan mempertimbangkan analisis KLHS tersebut, maka Rangkaian strategi untuk mencapai Misi ke 8 dijalankan dengan strategi :

(i) Pemerintah menegakkan regulasi dan (ii) Masyarakat berperilaku menjaga lingkungan sehat. Kondisi ini diharapkan menjadi pemacu mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan potensi bencana sehingga menciptakan kesejahteraan rakyat. Berdasar analisis KLHS, strategi ini dilengkapi dengan tindak lanjutnya berupa:

1. Pengembangan perencanaan, kebijakan fiskal dan keberpihakan
2. Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung mitigasi bencana;
4. Peningkatan pengelolaan sampah, limbah industri dan limbah domestik;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas air dengan mempertahankan tutupan lahan hijau;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan;
7. Pemasyarakatan mitigasi bencana.

Rangkaian strategi untuk mencapai **Visi "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik"** digerakkan melalui beberapa arah kebijakan, arah kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan risiko bencana; Kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sekitar dalam kawasan wilayah pengembangan Wanarakuti untuk Perluasan pasar dan variasi komoditas industri kreatif dan industri berbahan baku lokal dari masyarakat dengan memperhatikan keselamatan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.





### Keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran, dan Strategi

Karena bidang lingkungan hidup masuk pada Misi ke delapan guna mencapai Visi “Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” maka keterkaitan antara Visi, Misi dan strategi difokuskan pada Misi, sasaran dan Strategi kedelapan sebagai berikut :

**MISI 8: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.**

Tujuan	Sasaran	Strategi
8.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8.1.1. Menurunnya kerusakan lingkungan	8.1.1.1. Peningkatan indeks kualitas air melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik, penguatan fungsi pengawasan lingkungan; 8.1.1.2. Peningkatan luasan tutupan lahan melalui perluasan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
8.2. Menurunnya risiko bencana	8.2.1. Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	8.2.1.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui Desa tangguh Bencana; 8.2.1.2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana melalui penguatan kelembagaan.

### Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, Kabupaten Pati masuk dalam wilayah pengembangan Wanarakuti (Juwana-Jepara-Kudus-Pati) yang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Wilayah ini diarahkan sebagai PKW dan PKL dengan simpul utama berada di kawasan perkotaan Kudus, didukung oleh perkotaan Jepara, Pecangaan, Tayu Pati dan Juwana. Potensi regional yang dimiliki adalah potensi : (i) primer berupa perikanan; (ii) sekunder meliputi furniture, pengolahan tembakau, pengolahan ikan; dan (iii) tersier berupa pariwisata. Khusus untuk Kabupaten Pati, potensi unggulan yang dikembangkan adalah industri tapioka, batik dan kuningan; Minapolitan TPI Bajomulyo I dan Bajomulyo II di Kecamatan Juwana, dengan





komoditas unggulan cumi, kakap merah dan pindang; Agropolitan dengan komoditas jeruk pamelon dan kelapa kopyor. Adapun arah pengembangan klaster di Kabupaten Pati meliputi klaster tapioca, pengolahan hasil laut, kerajinan kuningan, konveksi, buah-buahan, budidaya bandeng air tawar, kopi, sutera alam, makanan ringan, batik tulis bakaran, handicraft, dan kapuk. Sementara itu untuk destinasi wisata yang dikembangkan adalah destinasi wisata Waduk Gunungrowo, Kebon Kopi Jolong, Goa Pancur dan Wareh.

Secara khusus, sasaran yang diharapkan dapat dicapai Kabupaten Pati terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT tahun 2017-2018 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Secara khusus, sasaran yang diharapkan dapat dicapai Kabupaten Pati terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT tahun 2017-2018 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan TPT**  
**Kabupaten Pati Tahun 2017-2018**

No	Indikator	2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,50 – 5,90	5,90 – 6,30
2	Angka Kemiskinan	8,98	7,99
3	TPT	7,44	7,27

*Sumber: Perubahan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018*

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Wanarakuti adalah Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang Lestari Berbasis Industri, Pariwisata, dan Agrominapolitan. Potensi industri pengolahan yang berada di Kudus dan Pati dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi wilayah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sedangkan pariwisata yang ada di Kudus maupun Jepara, dimana saat ini Jepara sebagai destinasi wisata nasional bahkan akan bertaraf internasional. Agrominapolitan merupakan konsep





penggabungan antara potensi perikanan yang ada disepanjang pesisir Wanarakuti terutama di wilayah Pati bagian utara dan pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bahan pokok industri pengolahan, pertanian ini berada di Jepara dan Pati bagian selatan.

Guna mendukung konsep tersebut maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Wanarakuti utamanya aspek lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Wanarakuti Aspek Lingkungan Hidup**

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang Berbasis Konsep Pengembangan Industri pariwisata dan Agrominapolitan	Lingkungan Hidup	Terwujudnya wilayah Wanarakuti yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Menjaga kondisi dan fungsi kawasan hulu (Muria) dan kawasan Kars (Kendeng, Sukolilo) sebagai kawasan lindung
			Menertibkan pembangunan tidak berijin pada kawasan lindung
			Menjaga kelestarian Wilayah pesisir sebagai daerah lindung luapan air laut
			Menertibkan penambangan liar
			Menjaga kelestarian DAS

Dari uraian diatas setelah dilakukan analisis dengan metode SWOT diperoleh Isu Lingkungan Strategis yang kemudian dilakukan FGD bersama pemangku kepentingan dan elemen masyarakat serta pemerhati lingkungan diperoleh Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yang tertuang dalam KLHS RPJMD sebagai berikut:





1. Isu Kemiskinan
2. Isu penurunan produktivitas tanaman pangan
3. Isu Penambangan Tanpa Izin
4. Isu Rawan Bencana Alam dan Iklim
5. Isu Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
6. Isu Pengelolaan Limbah Domestik belum optimal
7. Isu Pengelolaan Limbah Industri belum optimal
8. Isu Pengelolaan Persampahan belum optimal
9. Isu Kurang sadarnya masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
10. Isu Menurunnya Tutupan lahan hijau

Dari kesepuluh Isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas, dengan mekanisme Musrenbang, laporan masyarakat, saran masukan dan pengaduan warga serta diskusi dengan Tim Pembahas Dokumen IKPLHD yang terdiri dari OPD terkait serta mengikutkan kalangan akademis Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah meliputi :

1) kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya atau lemahnya praktek 3R, yaitu: *reused, reduced and recycled*); dan 2) Masih rendahnya pengelolaan air limbah domestik rumah tangga; 3) Masih rendahnya pengelolaan limbah industri, 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan mangrove.



**BAB III ANALISIS  
PRESSURE STATE  
RESPONSE ISU  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH**



LAPORAN IKPLHD KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017



**BAB III**  
**ANALISIS PRESSURE STATE DAN RESPONSE**  
**ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

**3.1. TATA GUNA LAHAN**

Penggunaan lahan di Kabupaten Pati pada tahun 2017 seluas 59.270 hektar atau sekitar 39,42% merupakan lahan pertanian sawah dan seluas 60.314 hektar atau 40,11% merupakan lahan pertanian kering, kemudian luas lahan bukan pertanian seluas 30.755 hektar atau 20,45%.

**Tabel 3.1.**

Luas Jenis Lahan di Kabupaten Pati Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian Sawah	Luas Lahan Pertanian Kering	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah Luas Lahan
1	Sukolilo	7.292	4.825	3.796	15.913
2	Kayen	4.937	2.365	2.301	9.603
3	Tambakromo	2.947	2.979	1.321	7.247
4	Winong	4.221	3.720	2.053	9.994
5	Pucakwangi	5.023	6.345	915	12.283
6	Jaken	3.595	2.355	902	6.852
7	Batangan	2.088	2.121	857	5.066
8	Juwana	1.536	2.956	1.101	5.593





9	Jakenan	3.963	268	1073	5.304
10	Pati	2.558	270	1.421	4.249
11	Gabus	4.075	108	1.368	5.551
12	Margorejo	2.750	2.300	1.131	6.181
13	Gembong	823	4.675	1.232	6.730
14	Tlogowungu	1.829	6.114	1.503	9.446
15	Wedarijaksa	2.178	874	1.033	4.085
16	Trangkil	1040	2.246	998	4.284
17	Margoyoso	1.265	3.055	1.677	5.997
18	Gunungwungkal	1.627	2.983	1.570	6.180
19	Cluwak	1.344	3.830	1.757	6.931
20	Tayu	2.184	1.309	1.266	4.759
21	Dukuhseti	2.063	4.616	1.480	8.159
	<b>Jumlah</b>	<b>59.270</b>	<b>60.314</b>	<b>30.755</b>	<b>150.368</b>

*Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun 2017*

Berdasarkan jenis penggunaan lahannya, Kecamatan Pucakwangi didominasi oleh lahan kering seluas 6.345 hektar. Hal ini disebabkan karena wilayahnya yang berada pada perbukitan dengan bentuk lahan struktural, sedangkan Kecamatan Gabus memiliki lahan kering tersempit seluas 108 hektar, disebabkan karena Kecamatan Gabus berada pada wilayah bentuk lahan fluvial dimana sebagian besar wilayahnya berupa lahan sawah. Lahan

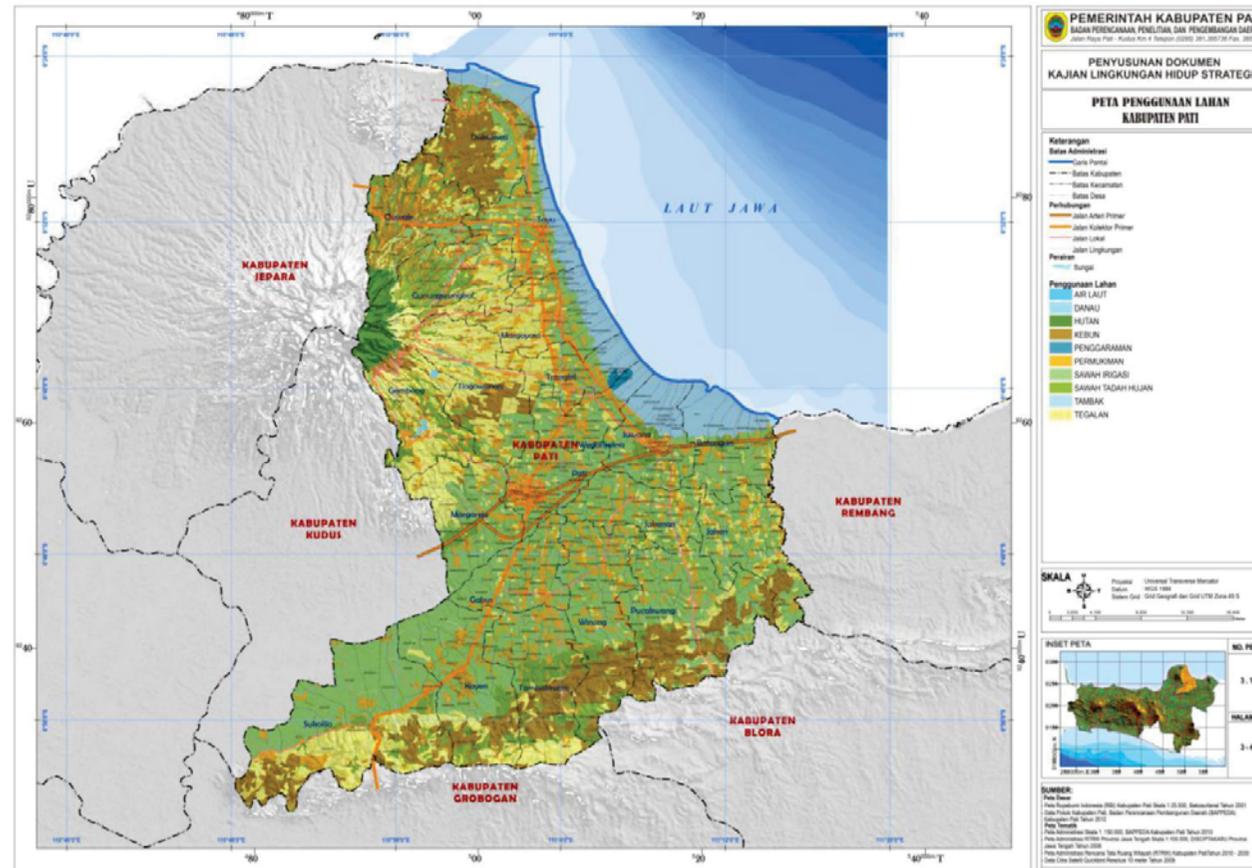




basah terluas berada di Kecamatan Sukolilo dengan luas 7.292 hektar, sedangkan lahan basah tersempit seluas 823 hektar yaitu di Kecamatan Gembong.

Gambaran kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Pati disajikan pada Gambar 3.1.





Gambar 3.1. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati

